
**Analisis Upaya Dari Amnesty International Terhadap Masalah Perbatasan
Di Ceuta Dan Melilla (2020-2024)**

**Analysis Of Amnesty International's Efforts On Border Issues In Ceuta
And Melilla (2020-2024)**

Sharfina Dwi Annifa¹, Intan Kinanthi Damarin Tyas², M. Dzikie Aulia Al Farauqi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Indonesia.

¹2111102434051@umkt.ac.id

²Ik713@umkt.ac.id

³mdaa343@umkt.ac.id

ABSTRAK

Masalah perbatasan antara Spanyol dan Maroko masih menjadi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Amnesty International dalam menangani permasalahan perbatasan di Ceuta dan Melilla pada periode 2020-2024. Permasalahan yang diangkat berfokus pada konflik migrasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat kebijakan represif yang diterapkan oleh Spanyol dan Maroko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amnesty International berperan sebagai aktor non-negara yang mendorong melalui advokasi dan investigasi. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik perbatasan dan peran penting organisasi non-pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak migran. Penelitian juga merekomendasikan pentingnya sinergi antara aktor negara, organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Amnesty International, Ceuta, Melilla, Hak Asasi Manusia, Migrasi

ABSTRACT

The border issue between Spain and Morocco remains an issue of human rights violations. This research aims to analyze Amnesty International's efforts in dealing with border issues in Ceuta and Melilla in the 2020-2024 period. The issues raised focus on migration conflicts and human rights violations that occur due to repressive policies implemented by Spain and Morocco. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature study and document analysis. The results show that Amnesty International acts as a non-state actor that promotes through advocacy and investigation. This research provides an in-depth understanding of the dynamics of border conflicts and the important role of non-governmental organizations in fighting for the rights of migrants. The research also recommends the importance of synergy between state actors, international organizations and civil society to create solutions that are just and based on human values.

Keywords: Amnesty International, Ceuta, Melilla, Human Rights, Migration

PENDAHULUAN

Kota Ceuta dan Melilla, dua enklave Spanyol di pesisir Afrika Utara, merupakan titik panas geopolitik dan isu kemanusiaan. Sejak diakuisisi pada abad ke-14 dan ke-16 (Saddiki, 2022), wilayah ini menjadi simbol sisa kolonialisme Spanyol di Afrika dan hingga kini menjadi objek klaim kedaulatan oleh Maroko. Bagi Spanyol, kedua wilayah tersebut memiliki nilai strategis sebagai gerbang perbatasan Eropa-Afrika, sedangkan bagi Maroko, pengembalian kedaulatan menjadi bagian dari agenda politik nasional. Perselisihan ini kerap memicu ketegangan bilateral, diperparah oleh isu migrasi yang sering digunakan sebagai instrumen tekanan politik.

Migrasi ilegal melalui Ceuta dan Melilla terus meningkat seiring perbedaan tingkat kesejahteraan antara Afrika Sub-Sahara dan Eropa. Data Kementerian Dalam Negeri Spanyol menunjukkan bahwa jumlah migran ilegal melalui jalur darat meningkat dari 1.000 orang pada tahun 2020 menjadi 2.000 orang pada 2021, bahkan melonjak hingga sekitar 8.000 orang pada 17-18 Mei 2021, termasuk 1.500 anak. Lonjakan ini memicu respons keamanan Spanyol melalui militerisasi perbatasan, pemasangan kawat berduri dan kerja sama dengan Frontex (Frontex, 2021). Namun, kebijakan tersebut belum menyelesaikan akar masalah dan menimbulkan risiko kemanusiaan, termasuk 23 korban jiwa dan 77 orang hilang pada 2022.

Amnesty International muncul sebagai actor non-negara yang berperan aktif mengadvokasi hak asasi manusia di perbatasan Ceuta dan Melilla. Amnesty tidak hanya melakukan investigasi dan publikasi temuan pelanggaran, tetapi juga melobi lembaga supranasional, menggalang dukungan publik, dan mendesak penghentian pendanaan penguatan pagar perbatasan. Strateginya mencakup *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics* yang bertujuan menggeser narasi migrasi dari isu keamanan menuju isu kemanusiaan.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis upaya Amnesty International dalam menangani permasalahan di perbatasan Maroko-Spanyol pada periode 2020-2024, dengan fokus pada strategi advokasi dan bentuk intervensi yang dilakukan. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, laporan resmi dan literatur relevan untuk memahami dinamika peran Amnesty dalam konteks sengketa kedaulatan dan migrasi. Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian memperkaya kajian hubungan internasional dan peran aktor non-negara dalam isu perbatasan. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi advokasi yang efektif serta bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam pengelolaan perbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan komprehensif mengenai interaksi antara kebijakan negara, dinamika geopolitik dan advokasi hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran dan strategi Amnesty International dalam merespons isu perbatasan Ceuta-Melilla. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengungkap makna, proses dan konteks tindakan aktor non-negara bukan melakukan pengukuran kuantitatif atau generalisasi statistik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktivitas advokasi Amnesty International terkait kebijakan perbatasan Maroko-Spanyol, yang mencakup strategi, bentuk intervensi dan respons pemerintah terhadap tekanan internasional. Kemudian sumber data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri dari literatur akademik, laporan resmi Amnesty International,

dokumen kebijakan pemerintah Spanyol, Maroko dan Uni Eropa, artikel media massa serta arsip resolusi atau pernyataan lembaga internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Penulis mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tersebut secara sistematis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola advokasi, dinamika kebijakan, serta isu hak asasi manusia di wilayah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi). Lebih lanjut, data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi, mengelompokkan dan menginterpretasikan pola-pola wacana, strategi advokasi, pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk respons kebijakan. Analisis dilakukan secara induktif sehingga temuan yang dihasilkan bersumber langsung dari data memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Konflik Perbatasan Ceuta-Melilla (2020-2024)

Konflik perbatasan antara Spanyol dan Maroko di wilayah Ceuta dan Melilla mencerminkan interaksi antara sejarah kolonial, persaingan geopolitik dan arus migrasi internasional. Kedua enklave ini memiliki status hukum sebagai wilayah otonom dibawah yurisdiksi penuh Spanyol, yang dikukuhkan melalui landasan konstitusional dan pengakuan hukum Uni Eropa. Bagi Spanyol, kedaulatan atas Ceuta dan Melilla bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan, didukung oleh fakta historis bahwa mayoritas penduduknya adalah warga negara Spanyol dan telah menyatakan keinginan untuk tetap berada di bawah pemerintahan Spanyol.

Sebaliknya, Maroko memandang Ceuta dan Melilla sebagai warisan kolonial yang keberadaannya melanggar prinsip dekolonisasi PBB. Klaim ini bukan sekadar retorika simbolis tetapi menjadi bagian integral dari agenda politik luar negeri Maroko. Maroko memanfaatkan kedekatan geografis, identitas kultural, dan posisi strategis kedua kota tersebut untuk membangun narasi kedaulatan yang kuat. Pernyataan resmi Perdana Menteri Maroko pada Desember 2020 yang menegaskan bahwa Ceuta dan Melilla milik Maroko sebagaimana Sahara Barat menjadi sinyal politik yang memicu eskalasi ketegangan diplomatik.

Isu migrasi ilegal menjadi katalisator utama yang memperburuk relasi kedua negara. Migrasi di wilayah ini tidak bersifat murni akibat tekanan ekonomi dan sosial dari Afrika Sub-Sahara melainkan seringkali dimanipulasi sebagai alat tawar politik (*instrumentalised migration*). Lonjakan pada Mei 2021, sekitar 8.000 migran termasuk 1.500 anak-anak masuk ke Ceuta hanya dalam dua hari merupakan contoh nyata bagaimana Maroko melonggarkan kontrol perbatasannya sebagai bentuk respons terhadap kebijakan Spanyol yang menerima pemimpin Front Polisario untuk perawatan medis. Data estimasi dari International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan

- Ceuta: 1.000 migran (2020) > 8.000 (2021) > 3.000 (2022) > 2.500 (2023) > 2.000 (2024).
- Melilla: 200 migran (2020) > 700 (2021) > 400 (2022) > 300 (2023-2024).

Tragedi Melilla pada 24 Juni 2022 yang menewaskan 23 migran menegaskan bahwa pengetatan perbatasan darat mendorong migran untuk mengambil jalur laut yang jauh lebih

berbahaya, menciptakan efek substitusi yang meningkatkan angka kematian dan menjadi bukti dampak fatal sekuritisasi.

Pergeseran arus migrasi di Ceuta dan Melilla juga berkaitan dengan kebijakan eksternalisasi Uni Eropa, di mana negara-negara transit seperti Maroko diberi peran besar dalam menahan migrasi sebelum mencapai wilayah UE. Fassi dan Ceccorulli (2021) menekankan bahwa model eksternalisasi ini efektif menurunkan tekanan migrasi di perbatasan Eropa, tetapi mengabaikan standar perlindungan HAM karena lemahnya mekanisme akuntabilitas di negara transit. Dalam konteks Ceuta dan Melilla, eksternalisasi berkontribusi pada pola relasi yang asimetris: Spanyol sangat bergantung pada kerja sama Maroko, sementara Maroko dapat memanfaatkan ketergantungan ini sebagai instrumen diplomasi strategis.

2. Respons Pemerintah Spanyol dan Maroko terhadap Migrasi

Respons Spanyol terhadap migrasi ilegal di Ceuta dan Melilla didominasi oleh pendekatan keamanan yang berorientasi pada sekuritisasi. Strategi ini mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik seperti pagar ganda dengan kawat berduri, sistem pengawasan canggih termasuk kamera termal, serta pengerahan militer pada saat krisis memuncak. Renovasi pagar perbatasan dengan peninggian hingga 30% dan penggantian kawat baja, menelan biaya jutaan euro sebagai upaya memperkuat pertahanan fisik. Namun, meski investasi besar dilakukan, insiden Mei 2021 membuktikan bahwa keamanan fisik tidak sepenuhnya efektif ketika faktor politik dari negara tetangga dimobilisasi.

Selain itu, Spanyol menerapkan kebijakan *pushback* atau pengusiran langsung terhadap migran yang melintasi perbatasan tanpa prosedur hukum. Praktik ini dikritik oleh García (2020) dan berbagai lembaga HAM karena melanggar prinsip *non-refoulement* dalam Konvensi Pengungsi 1951. Tindakan tersebut menciptakan zona abu-abu hukum yang membuat migran tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan atau proses suaka yang sah. Respons ini mungkin berhasil memulihkan kontrol perbatasan dalam jangka pendek, tetapi tidak mengatasi akar masalah migrasi dan justru meningkatkan risiko kemanusiaan.

Sedangkan Maroko mengadopsi strategi yang bersifat ambigu. Pada satu sisi, Maroko bekerja sama dengan Spanyol melalui perjanjian repatriasi migran tahun 2023 dan program regularisasi bagi migran Sub-Sahara yang telah dimulai sejak 2013. Pada sisi lain, Maroko menggunakan migrasi sebagai alat diplomasi untuk menekan Spanyol dalam isu Sahara Barat. Pelonggaran kontrol perbatasan pada Mei 2021 merupakan pesan simbolik bahwa Maroko dapat mengatur arus migran sebagai bentuk leverage politik. Ferstman (2024) menyebut strategi ini sebagai *diplomasi migrasi*, di mana migran menjadi instrumen negosiasi dalam hubungan bilateral maupun dengan pihak ketiga seperti Uni Eropa.

Kedua negara memprioritaskan keamanan perbatasan di atas perlindungan HAM. Laporan Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pada 2024 mengonfirmasi bahwa praktik *pushback* masih berlangsung di kedua enklave tersebut. Sementara itu, Human Rights Watch (2023) menegaskan bahwa pendekatan eksklusif berbasis pencegahan fisik tidak hanya gagal mengurangi migrasi ilegal secara signifikan, tetapi juga memindahkan risiko kepada migran, mendorong mereka untuk mengambil jalur yang lebih mematkan.

Kebijakan yang dijalankan Spanyol dan Maroko memperlihatkan bahwa faktor ekonomi

dan pembangunan hanya menjadi elemen tambahan dalam strategi jangka panjang. Upaya revitalisasi jalur perdagangan formal di sekitar Ceuta dan Melilla untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada perdagangan informal dan penyelundupan tetapi dampaknya terhadap pengurangan migrasi masih minim. Sebagian besar sumber daya tetap terserap untuk memperkuat infrastruktur dan operasi keamanan sehingga pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak masih terpinggirkan.

3. Peran Amnesty International dalam Advokasi Migran

Boomerang pattern adalah sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) sudah tidak mampu menjalankan sesuatu untuk menyelesaikan isu domestik di negaranya, maka dapat membentuk jaringan dengan NGO luar negeri yang akan digunakan untuk melakukan pertukaran informasi, bantuan advokasi hingga dengan bantuan finansial. Amnesty International sebagai aktor kunci di ranah advokasi transnasional yang berupaya menggeser narasi dominan tentang migrasi dari isu keamanan menjadi isu kemanusiaan. Peran ini dijalankan melalui serangkaian strategi yang selaras dengan kerangka *Transnational Advocacy Networks* sebagaimana dirumuskan oleh Keck dan Sikkink (1998) yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

Melalui *information politics*, Amnesty memproduksi laporan investigatif yang kredibel dan berbasis bukti lapangan. Salah satu yang paling menonjol adalah laporan *They Treated Us Like Animals* (2022) yang memuat dokumentasi detail pelanggaran HAM di perbatasan, termasuk kekerasan fisik oleh aparat, korban jiwa dan kesaksian langsung dari migran seperti Zacharias, seorang pemuda asal Chad yang menggambarkan pengalaman brutalnya di Melilla. Laporan ini mendeskripsikan peristiwa juga menempatkannya dalam kerangka hukum internasional seperti pelanggaran terhadap Pasal 3 *Convention against Torture* dan prinsip *non-refoulement*. Dengan cara ini Amnesty membangun legitimasi moral dan hukum yang kuat untuk menekan negara dan memobilisasi opini publik global.

Strategi *symbolic politics* digunakan untuk menciptakan resonansi emosional yang mampu menggugah simpati publik internasional. Amnesty menyebarkan foto, video dan narasi yang memperlihatkan kondisi mengenaskan para migran termasuk dokumentasi pemakaman massal rahasia oleh otoritas Maroko tanpa partisipasi keluarga dan tanpa identifikasi forensik. Simbol-simbol ini memperkuat framing bahwa Ceuta dan Melilla bukan sekadar perbatasan fisik tetapi merupakan *frontier of injustice* yang mencerminkan kegagalan struktural dalam perlindungan HAM. Pasca siaran pers Amnesty, sejumlah media besar seperti *The Guardian*, *Deutsche Welle* dan *Al Jazeera* mengangkat tajuk utama terkait penggunaan migran sebagai pion politik dengan mengutip langsung rilis Amnesty sebagai sumber kredibel (DW, 2023).

Dalam *leverage politics*, Amnesty mengalihkan fokus advokasinya ke aktor-aktor yang memiliki kapasitas politik dan reputasi internasional lebih besar daripada target langsungnya. Misalnya, Amnesty mengaitkan pelanggaran HAM di Ceuta-Melilla dengan reputasi Uni Eropa secara keseluruhan menekankan bahwa jika perbatasan Spanyol adalah perbatasan Uni Eropa, maka pelanggaran di perbatasan Spanyol adalah pelanggaran Uni Eropa. Strategi ini memanfaatkan tekanan reputasional untuk memengaruhi kebijakan, yang terlihat dari tanggapan Komisi Eropa yang menegaskan kembali komitmen pada prinsip HAM dalam pengelolaan perbatasan.

Melalui *accountability politics*, Amnesty berupaya memaksa negara untuk mematuhi komitmen hukum dan moral yang telah mereka nyatakan sendiri. Setelah tragedi Melilla 2022,

Amnesty mengirimkan permintaan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri Spanyol untuk membuka hasil penyelidikan dan mengungkapkan daftar resmi korban tewas serta hilang. Ketika permintaan ini diabaikan, Amnesty meningkatkan tekanannya ke tingkat internasional dengan membawa kasus tersebut ke Dewan HAM PBB menuntut adanya investigasi independen yang berbasis pada standar HAM internasional. Hal ini terlihat pada peringatan satu tahun tragedi Melilla “*Morocco/Spain: Agony goes on for families of missing and dead as Melilla cover-up continues*” yang dipublikasikan pada Juni 2023, Amnesty menegaskan bahwa otoritas Spanyol dan Maroko gagal total dalam memberikan keadilan, transparansi dan pemulihan kepada para korban dan keluarga mereka (Amnesty International, 2023).

4. Desekuritisasi Krisis Migran

Peran Amnesty International dalam advokasi migran di Ceuta-Melilla dapat dilihat sebagai proses *desekuritisasi* yaitu upaya mengeluarkan isu migrasi dari kerangka ancaman keamanan dan mengembalikannya ke dalam ranah politik dan kemanusiaan yang terbuka untuk debat public (Rahmadan, 2024). Proses ini dilakukan melalui perubahan representasi yang menggambarkan migran sebagai korban dan penyintas, bukan pelintas ilegal serta melalui advokasi struktural yang menuntut perubahan kebijakan berbasis prinsip perlindungan.

Proses desekuritisasi Amnesty dimulai dari level representasi. Amnesty menyebut para migran sebagai *victims, survivors*, dan orang yang mencari aman bukan sebagai pelintas batas ilegal. Dalam kampanye *Truth, Justice & Reparations*, Amnesty mengangkat testimoni personal menggambarkan harapan untuk hidup yang layak, sebagai bentuk dekonstruksi identitas migran dari narasi ancaman menjadi subjek manusiawi yang memiliki hak. Amnesty dengan tegas menolak pelabelan ilegal dan penyusup sehingga termanifestasi dalam strategi penyampaian narasi visual dan afektif yang digunakan Amnesty dalam aksi damai, media social serta dokumentasi lapangan.

Proses ini berlanjut dalam bentuk advokasi struktural. Amnesty mengajukan petisi kepada otoritas Spanyol dan Uni Eropa untuk menghentikan praktik *pushbacks* dan mendesak investigasi terhadap aparat yang terlibat. Seruan ini mengarah pada pertanggungjawaban hukum dan perubahan kebijakan tidak menggunakan pendekatan militeristik dalam pengelolaan perbatasan. Amnesty mendesak agar pendekatan keamanan digantikan oleh sistem yang berbasis hak dan perlindungan misalnya dengan membuka akses terhadap prosedur suaka dan memastikan perlindungan *non-refoulement*.

Upaya yang dilakukan oleh Amnesty International mencerminkan praktik dari desekuritisasi pada dua tingkat utama. Pada tingkat representasi, Amnesty berupaya membingkai ulang identitas para migran bukan sebagai ancaman terhadap keamanan negara namun sebagai korban dari sistem perbatasan yang diskriminatif dan represif, menunjukkan menggeser wacana dominan dari keamanan menuju keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dan di tingkat kebijakan, Amnesty menuntut penghentian praktik pushback dan kekerasan sistematis terhadap migran serta mendorong implementasi mekanisme perlindungan yang berbasis pada prinsip non-refoulement dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, efektivitas strategi Amnesty International dalam mendorong desekuritisasi kebijakan perbatasan Spanyol masih menghadapi berbagai hambatan atau terbatas. Meskipun narasi HAM berhasil diangkat ke ranah internasional dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, negara tetap menjadi aktor dominan yang mempertahankan pendekatan sekuritisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan wacana tidak sepenuhnya mengubah kebijakan.

5. Dampak Intervensi Amnesty International terhadap Kebijakan Perbatasan

Intervensi Amnesty International menghasilkan sejumlah dampak yang bervariasi di tingkat nasional, supranasional, dan internasional. Di tingkat nasional, tekanan publik yang dibangun melalui kampanye global dan publikasi laporan memaksa pemerintah Spanyol untuk memperhalus narasi resmi terkait penanganan migran. Beberapa protokol lapangan diperbaiki, terutama dalam hal prosedur identifikasi dan penanganan anak-anak migran, meskipun kebijakan substantif seperti praktik *pushback* tetap dipertahankan.

Di tingkat supranasional, isu Ceuta-Melilla berhasil masuk ke agenda Parlemen Uni Eropa. Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan legitimasi kebijakan eksternalisasi kontrol migrasi dan menuntut evaluasi ulang terhadap praktik kerja sama dengan negara-negara transit yang memiliki catatan pelanggaran HAM. Tekanan ini memperluas konsekuensi politik dari insiden di Ceuta-Melilla yang memaksa Uni Eropa untuk menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian dari diskursus kebijakan perbatasan. Di tingkat internasional, Amnesty membawa isu ini ke forum Dewan HAM PBB yang meningkatkan visibilitas global terhadap pola kekerasan dan pelanggaran di perbatasan Spanyol-Maroko (Rahmadan, 2024). Langkah ini memperkuat legitimasi intervensi lembaga internasional dalam isu yang sebelumnya dianggap sebagai urusan domestik atau bilateral, sekaligus membuka peluang tindak lanjut di masa depan berupa investigasi independen atau resolusi yang mengikat.

Meskipun efektivitas intervensi Amnesty terbatas oleh realitas geopolitik dan keamanan, Spanyol, menghadapi tekanan migrasi dan kebutuhan menjaga hubungan strategis dengan Maroko tetap mempertahankan pendekatan sekuritisasi dan eksternalisasi kontrol migrasi juga menggunakan migrasi sebagai alat tawar diplomatik yang efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hak asasi manusia yang diusung oleh aktor non-negara seperti Amnesty dan prioritas keamanan serta kepentingan politik negara yang menjadi penentu akhir kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik perbatasan Ceuta dan Melilla antara Spanyol dan Maroko berakar pada sengketa kedaulatan dan pemanfaatan migrasi sebagai instrumen politik dan diplomasi. Lonjakan migrasi yang terjadi membuktikan bahwa arus manusia dapat dimobilisasi secara strategis untuk memengaruhi kebijakan negara lain. Kebijakan eksternalisasi migrasi yang diterapkan Uni Eropa melalui Spanyol dan kerja sama dengan Maroko memperlihatkan ketergantungan yang menciptakan ruang bagi praktik negosiasi asimetris dimana perlindungan hak asasi manusia terabaikan oleh pertimbangan keamanan dan geopolitik.

Respons kedua negara pada umumnya didominasi oleh strategi sekuritisasi. Spanyol mengandalkan penguatan infrastruktur perbatasan, pengerahan militer dan penerapan praktik *pushback*, sementara Maroko mengadopsi strategi ganda seperti bersikap kooperatif melalui perjanjian repatriasi namun sekaligus memanfaatkan kontrol perbatasan sebagai alat tekanan politik. Pendekatan ini meskipun efektif dalam mengendalikan situasi jangka pendek, tidak menyentuh akar persoalan dan justru mendorong migran untuk mengambil jalur yang lebih berisiko, meningkatkan angka kematian serta pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*.

Amnesty International memainkan peran penting sebagai aktor advokasi transnasional. Melalui penerapan *boomerang pattern*, Amnesty menggabungkan strategi *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics* untuk menggeser narasi migrasi dari isu keamanan menjadi isu kemanusiaan. Publikasi laporan investigatif, kampanye berbasis kesaksian korban, penggunaan simbol-simbol yang kuat serta tekanan terhadap aktor-aktor supranasional menjadi instrumen yang memperluas perhatian global terhadap situasi di Ceuta dan Melilla. Walaupun perubahan kebijakan substantif belum sepenuhnya tercapai, intervensi Amnesty berhasil meningkatkan pengawasan internasional, membentuk opini publik global dan memaksa adanya perdebatan kritis di tingkat Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2021, February 10). *Europe: Pushback practices and their impact on the human rights of migrants and refugees – Amnesty International Submission to the United Nations (UN) Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, February 2021*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/3669/2021/en/>
- Amnesty International. (2022, Desember 13). *Truth, Justice, Reparations: Spain and Morocco must provide answers to victims of human rights violations in Melilla*. Retrieved from Amnesty international: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/12/truth-justice-reparations-spain-and-morocco-must-provide-answers-to-victims-of-human-rights-violations-in-melilla/>
- Amnesty International. (2023, June 23). *Morocco/Spain: Agony goes on for families of missing and dead as Melilla cover-up continues*. Amnesty International. Retrieved from Amnesty international: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/06/morocco-spain-agony-goes-on-for-families-of-missing-and-dead-as-melilla-cover-up-continues/>
- DW. (2023, Juni 23). *Amnesty accuses Spain, Morocco of cover-up in Melilla deaths*. Retrieved from infomigrants: <https://www.infomigrants.net/fr/post/49904/amnesty-accuses-spain-morocco-of-coverup-in-melilla-deaths>
- Frontex. (2021, Januari 29). *Frontex continues its support for Spain*. Retrieved from Frontex: <https://www.frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-continues-its-support-for-spain-nOvbKi>
- Human Rights Watch. (2023, June 22). *Spain/Morocco: No Justice for Deaths at Melilla Border*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2023/06/22/spain/morocco-no-justice-deaths-melilla-border>
- IOM. (2022). *Missing Migrants in Mediterranean*. Retrieved from Missing Migrants Project: <https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Rahmadan, Y. (2024). Regulating European Union's Border in Africa: The Practice of Semi-permeable Border in Ceuta and Melilla . *Journal of International Studies*, 14-28.
- Saddiki, S. (2022). Knocking at the Walls of Ceuta and Melilla: irregular Migration and the Political-Security Nexus. *Moroccan Institute for Policy Analysis*, 1-12.